



LAPORAN KEUANGAN

20
23

*Deputi II
Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik*

**JAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 6 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	61

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23, JAKARTA PUSAT 10560
TELEPON 021 4244819, 4207683, 4244691 FAXIMILE 021 4244819**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Anggaran 2023 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 6 Mei 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp123.410.799.909,00 atau mencapai 106 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp116.604.450.000,00. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp54.876.482.183,00 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 54.877.335.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.270.348.854,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp28.116.000,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp4.634.102.500,00, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp608.130.354,00, Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.586.875.000,00 dan Rp3.316.526.146,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar

Rp123.989.337.500,00. Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp55.848.154.995,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp68.141.182.505,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp139.137.811,00) dan sebesar Rp68.002.044.694,00. sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp68.002.044.694,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar (Rp3.508.378.978,00) dikurangi Surplus-LO sebesar Rp68.002.044.694,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp5.646.136,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp67.804.545.726,00) serta kenaikan ekuitas sebesar Rp191.852.832,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai (Rp3.316.526.146,00)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

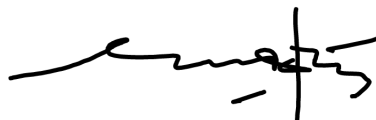
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 1. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23			% thd Angg	31-Dec-22
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Di Bawah)		REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	116.604.450.000	123.410.799.909	(6.806.349.909)	105,84	115.523.805.999
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		116.604.450.000	123.410.799.909	(6.806.349.909)	105,84	115.523.805.999
BELANJA	B.2.					
Belanja Barang	B.3	53.333.897.000	53.333.044.883	(852.117)	100,00	30.921.729.043
Belanja Modal	B.4	1.543.438.000	1.543.437.300	(700)	100,00	2.031.871.901
JUMLAH BELANJA		54.877.335.000	54.876.482.183	(852.817)	100,00	32.953.600.944

Jakarta, 6 Mei 2024
 Kuasa Pengguna Anggaran
 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
 Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
 NIP 19660909 199303 2 002

II. NERACA

**Tabel 2. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Persediaan	C.1.1	28.116.000	52.630.700
Jumlah Aset Lancar		28.116.000	52.630.700
ASET TETAP	C.2		
Peralatan dan Mesin	C.2.1	16.017.692.725	13.943.165.425
Aset Tetap Lainnya	C.2.3	302.765.200	302.765.200
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.4	(11.686.355.425)	(9.390.926.255)
Jumlah Aset Tetap		4.634.102.500	4.855.004.370
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tidak Berwujud	C.3.1	2.117.140.400	2.181.715.400
Aset Lain-Lain	C.3.2		1.704.152.234
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(1.509.010.046)	(3.047.519.182)
Jumlah Aset Lainnya		608.130.354	838.348.452
JUMLAH ASET		5.270.348.854	5.745.983.522
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.1	8.586.875.000	9.254.362.500
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.586.875.000	9.254.362.500
JUMLAH KEWAJIBAN		8.586.875.000	9.254.362.500
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	(3.316.526.146)	(3.508.378.978)
JUMLAH EKUITAS		(3.316.526.146)	(3.508.378.978)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.270.348.854	5.745.983.522

Jakarta, 6 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

NIP 19660909 199303 2 002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

Tabel 3. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	123.989.337.500	113.860.337.500
JUMLAH PENDAPATAN		123.989.337.500	113.860.337.500
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	327.646.200	97.918.300
Beban Barang dan Jasa	D.3	20.680.133.607	17.437.027.401
Beban Pemeliharaan	D.4	131.558.748	33.858.449
Beban Perjalanan Dinas	D.5	32.218.221.028	24.078.447.659
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	2.490.595.412	2.500.269.075
JUMLAH BEBAN		55.848.154.995	44.147.520.884
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		68.141.182.505	69.712.816.616
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		83.679.909	47.555.999
Beban Pelepasan Aset Nonlancar		228.087.720	23.352.000
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.7	(144.407.811)	24.203.999
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		5.270.000	-
Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan non Operasional Lainnya	D.8	5.270.000	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(139.137.811)	24.203.999
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		68.002.044.694	69.737.020.615

Jakarta, 6 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

NIP 19660909 199303 2 002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**Tabel 4. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1	(3.508.378.978)	6.098.817.612
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	68.002.044.694	69.518.208.115
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
	E.4		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2		-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3		-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	(5.646.136)	(45.000.000)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	(7.419.637.500)
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(5.646.136)	(7.464.637.500)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS			
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(67.804.545.726)	(71.660.767.205)
EKUITAS AKHIR	E.6	(3.316.526.146)	(3.508.378.978)

Jakarta, 6 Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

NIP 19660909 199303 2 002

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

*Profil dan
Kebijakan Teknis
Satker Deputy II*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai:

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

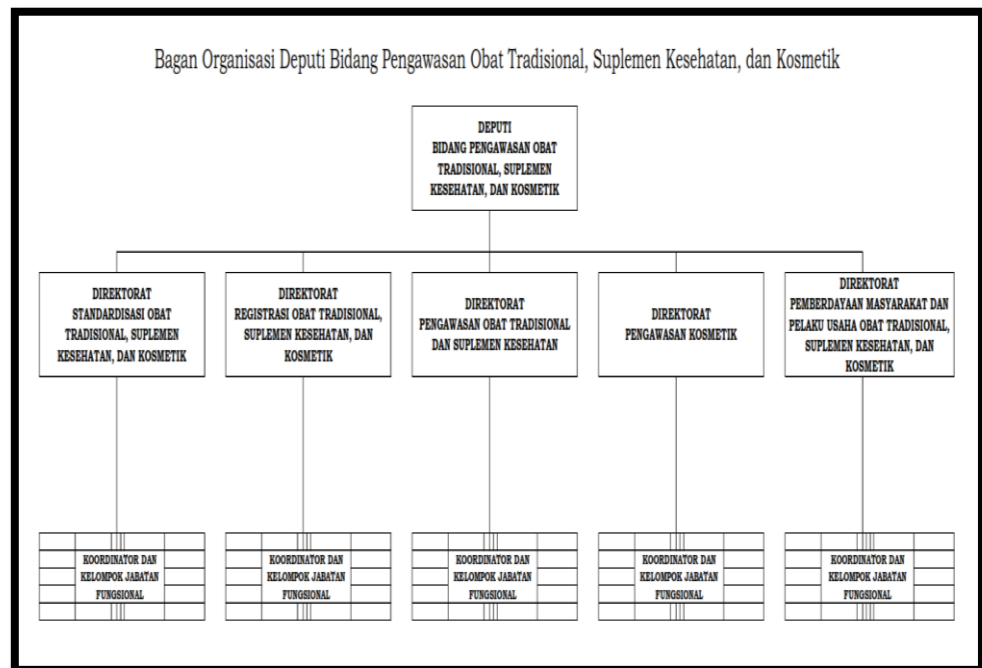
Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Deputi II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

- Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Direktorat Pengawasan Kosmetik
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

A.1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi diisi nama satker untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2019-2024. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Misi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk periode tahun anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengajui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tahun anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Badan POM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagai berikut:

Pendapatan-LRA **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

- Pada layanan jasa penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE)
- Penerbitan Nomor Izin Edar dan Notifikasi, Persetujuan Iklan, dan Penerbitan persetujuan uji klinik
- Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik dan Cara Pembuatan Kosmetik yang baik
- Penerbitan Persetujuan Denah Kosmetik
- Penerbitan rekomendasi Fasilitas Bersama
- Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN)

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di

neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria kualitas piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan asset yang berupa :
 1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
 - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetak (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
 - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
 - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
 2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
 3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
 4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Perka Badan POM No. 3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan POM dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan Badan POM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu

rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sampel). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian
 - b. Biaya pengangkutan
 - c. Biaya penanganan
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
 2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a. Potongan harga
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
 - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.
 3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh Badan POM, sesuai

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.

- Persediaan alat gelas laboratorium adalah peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca, plastik atau bahan lainnya yang digunakan untuk keperluan laboratorium. Alat gelas yang diakui sebagai persediaan meliputi:
 - a. Alat gelas berupa alat ukur kuantitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
 - 3) Alat gelas di laboratorium yang sudah digunakan. dan masih dalam keadaan baik.
 - b. Alat gelas berupa alat ukur kualitatif diantaranya:
 - 1) Alat gelas yang masih ada di gudang.
 - 2) Alat gelas di laboratorium yang belum digunakan.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
 - 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan. Termasuk dalam Piutang jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor :240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di Badan POM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh

tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp54.877.335.000,00. Selama periode berjalan telah melakukan revisi sebanyak 4 kali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yang disebabkan Rfocussing, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pasa saat pelaksanaan. Rincian revisi DIPA untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- Revisi DIPA 1 tanggal 27 Desember 2022 senilai Rp54.877.335.000,00 untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.03.03.41.412.12.22.2398 tanggal 19 Desember 2022
- Revisi DIPA 2 tanggal 16 Februari 2023 senilai Rp54.877.335.000,00 untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.03.03.41.412.02.23.276 tanggal 14 Februari 2023
- Revisi DIPA 3 tanggal 17 April 2023 senilai Rp54.877.335.000,00 untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.03.03.41.412.04.23.616 tanggal 13 April 2023
- Revisi DIPA 4 tanggal 14 Juli 2023 senilai Rp54.877.335.000,00 untuk membuka anggaran yang di blokir, merevisi akun covid 19 serta mengantisipasi

terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan sesuai surat usulan revisi anggaran No. PR.05.03.41.412.06.23.1193 tanggal 22 Juni 2023

Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam Rupiah)

Uraian	2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	116.604.450.000	116.604.450.000
Jumlah Pendapatan	116.604.450.000	116.604.450.000
Belanja		
Belanja barang	53.112.872.000	53.333.897.000
Belanja Modal	1.764.463.000	1.543.438.000
Jumlah Belanja	54.877.335.000	54.877.335.000

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Anggaran dan Program maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Realisasi Pendapatan berdasarkan Anggaran dan Program

(dalam Rupiah)

Kode	Program	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Pegawai (51)	063.01.DR Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00
Belanja Barang (52)		53.112.872.000,00	53.333.044.883,00
Belanja Modal (53)		1.764.463.000,00	1.543.437.300,00
Total		54.877.335.000,00	54.876.482.183,00

*Realisasi
Pendapatan
Rp123.410.799.909,00*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp123.410.799.909,00 dan Rp115.523.805.999,00. Realisasi pendapatan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 6,78% dibandingkan tahun anggaran 2022, naiknya realisasi pendapatan dikarenakan pada tahun Anggaran 2023 realisasi pendapatan

PNBP Fungsional dicatat oleh Satker Kantor Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdiri hanyalah pendapatan yang berasal dari Pendapatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
(dalam Rupiah)

Uraian	31-Dec-23		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Negara dan Hibah	-	-	-
1. Penerimaan Dalam Negeri	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	116.604.450.000	123.410.799.909	105,84
Jumlah	116.604.450.000	123.410.799.909	105,84

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 berupa pendapatan fungsional yang terdiri dari Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan, Penjualan Peralatan dan Mesin, dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 13. Rincian Pendapatan
(dalam Rupiah)

No	Akun	Uraian	Estimasi	Realisasi	Persentase
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	83.679.909	N/A
1	425321	Pendapatan jasa Pengawasan Obat dan Makanan	116.604.450.000	123.321.850.000	105,76
2	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	5.270.000	N/A
Total PNBP				123.410.799.909	

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan 6,78 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan pada tahun Anggaran 2023 realisasi pendapatan PNBP Fungsional dicatat oleh Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berasal dari Pendapatan Fungsional sebesar 105,76 persen dari estimasi pendapatan, pengelolaan BMN yaitu berupa Penjualan peralatan dan mesin serta penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang

lalu. Rincian Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

*Tabel 15. Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	83.679.909	47.555.999	75,96
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	123.321.850.000	115.523.805.999	6,75
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	5.270.000	-	N/A
Jumlah	123.410.799.909	115.571.361.998	6,78

Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin senilai Rp83.679.909,00 yaitu :

- Pendapatan penjualan lelang kendaraan operasional Rp45.678.910,00 merupakan pendapatan penjualan lelang kendaraan operasional dengan No NTPN 27AF81JNFLOQT6B5 tanggal 22 Mei 2023
- Pendapatan penjualan lelang inventaris kantor Rp38.000.999,00 merupakan pendapatan penjualan lelang barang inventaris kantor dengan No NTPN 594627QLUG25MTGK tanggal 11 Agustus 2023

Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan senilai Rp123.321.850.000,00 merupakan Pendapatan Fungsional Jasa Pengawasan Obat dan Makanan.

Penerimaan Kembali belanja barang TAYL yaitu berupa pengembalian honor adalah pengembalian honor dalam rangka perjalanan dinas dalam kota senilai Rp5.270.000,00 dengan No. NTPN AFFD22G4VFUN8NE8 tanggal 2 Januari 2023 .

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**

Rp54.876.482.183,00

Realisasi Belanja instansi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp54.876.482.183,00 atau 100% dari anggaran

belanja sebesar Rp53.877.335.000,00. Rincian Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	31-Dec-23		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	53.333.897.000	53.535.817.193	100,38
Belanja Modal	1.543.438.000	1.543.437.300	100,00
Total Belanja Kotor	54.877.335.000	55.079.254.493	100,37
Pengembalian		(202.772.310)	-
Jumlah	54.877.335.000	54.876.482.183	100,00

Dibandingkan Tahun Anggaran 2022 realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 25.16 persen. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada belanja barang sebesar 28.15 persen dan penurunan pada belanja modal yaitu sebesar 28.40%.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	53.535.817.193	41.775.895.449	28,15
Belanja Modal	1.543.437.300	2.155.683.901	(28,40)
Jumlah	55.079.254.493	43.931.579.350	25,38
Pengembalian	(202.772.310)	(86.037.940)	135,68
Jumlah Netto	54.876.482.183	43.845.541.410	25,16

Belanja Barang
Rp53.333.044.883,00

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp53.333.044.883,00 dan Rp41.689.857.509,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 27.61 persen dari Realisasi Belanja Barang pada 2022 karena meningkatnya belanja pemeliharaan sebesar 358,62 persen. Rincian Realisasi

Belanja Barang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Tabel 18. Perbandingan Belanja Barang
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)*

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.616.137.653	3.123.321.027	(48,26)
Belanja Barang Non Operasional	8.702.069.407	5.289.692.462	64,51
Belanja Barang Konsumsi	303.131.500	140.524.000	115,72
Belanja Sewa	776.788.280	440.378.878	76,39
Belanja Jasa	9.587.688.267	8.583.635.034	11,70
Belanja Pemeliharaan	131.558.748	33.858.449	288,56
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31.662.496.335	23.806.244.871	33,00
Belanja Perjalanan Luar Negeri	755.947.003	358.240.728	111,02
Jumlah Belanja Kotor	53.535.817.193	41.775.895.449	28,15
Pengembalian Belanja	(202.772.310)	(86.037.940)	N/A
Jumlah Belanja	53.333.044.883	41.689.857.509	27,93

Terdapat pengembalian belanja senilai Rp202.772.310,00 dengan rincian sebagai berikut :

- Pengembalian belanja bahan senilai Rp2.550.000,00
- Pengembalian belanja Perjalanan Biasa senilai Rp117.043.999,00
- Pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota senilai Rp2.033.000,00
- Pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota senilai Rp81.145.311,00

Pengembalian belanja tersebut dilakukan pulih pagu pada periode anggaran berjalan

B.2.1.1 Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Satker Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalokasikan belanja barang sebesar Rp60.660.000,00. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp60.660.000,00 atau 100%. Rincian Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid 19 untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19

(dalam Rupiah)

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	60.660.000	60.660.000	100%
	Pengembalian		0	
	Total	60.660.000	60.660.000	100,00%

Penggunaan anggaran Belanja Barang untuk penanganan pandemi covid-19 digunakan sampai dengan semester 1 2023 sesuai Surat Edaran Kementerian Keuangan No. S-24/PB/023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penggunaan Akun Khusus Covid-19

Belanja Modal
Rp1.543.437.300,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.543.437.300,00 dan Rp2.155.683.90-241,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 22.08 persen dibandingkan 31 Desember 2022. Rincian Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.178.112.300	1.511.857.501	(22,08)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	6.400.000	0	100,00
Belanja Modal Lainnya	69.000.000	210.707.000	(67,25)
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	289.925.000	433.119.400	(33,06)
Jumlah Belanja Kotor	1.543.437.300	2.155.683.901	(28,40)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.543.437.300	2.155.683.901	(28,40)

Belanja Modal B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Peralatan dan

Mesin

Rp1.178.112.300,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.178.112.300,00 dan Rp1.511.857.501,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan sebesar 22,08 persen bila dibandingkan dengan realisasi 2022. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 (dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Alat Angkutan	0	0	N/A
Alat Kantor dan Rumah tangga	256.703.300	44.207.550	480,7
Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	103.364.000	76.037.901	35,9
Komputer Unit dan Peralatan Komputer	818.045.000	1.387.515.050	(41,04)
Jumlah Belanja Kotor	1.178.112.300	1.507.760.501	(21,86)
Pengembalian	0	0	N/A
Jumlah Belanja	1.178.112.300	1.507.760.501	(21,86)

Rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa :

Tabel 23. Rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Uraian	Kuantitas	Nilai
Alat Penghancur Kertas	1	6.500.000
Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1.900.000
Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	1	6.550.000
Bracket Standing Peralatan	1	1.400.000
Camera Conference	1	3.900.000
Camera Digital	1	40.599.000
Dispenser	1	13.949.000
External/ Portable Hardisk	1	1.000.000
Hard Disk	2	15.443.000
Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	1	1.682.000
Lampu Blitz Kamera	1	3.680.000
Lap Top	3	521.000.000
LCD Monitor	1	2.565.000
Lemari Besi/Metal	2	21.600.000
Lemari Es	1	3.568.300
Lemari Kayu	3	154.321.000
Lighting Mechanic	1	13.990.000
Loudspeaker	1	13.800.000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	6.680.000
Microphone/Wireless MIC	1	5.500.000
PC Workstation	3	208.170.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	23.700.000
Refrigerator	1	2.550.000
Rice Cooker (Alat Dapur)	1	1.285.000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	34.100.000
Sound System	1	7.950.000
Tablet PC	1	12.950.000
Tripod Camera	1	7.880.000
TV Monitor	2	21.200.000
Video Conference	1	18.700.000
Grand Total	40	1.178.112.300

Belanja
Penambahan Nilai
Peralatan dan
Mesin

Rp6.400.000,00

B.5.2 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.400.000,00 dan Rp0,00. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Pengembangan upgrade Memory RAM pada PC Komputer sebanyak 4 unit

Belanja Modal
Lainnya

Rp69.000.000,00

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp69.000.000,00 dan Rp136.115.000,00. Belanja Modal Lainnya mengalami penurunan sebesar 49,31 persen bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022. Belanja Modal Lainnya berupa:

Tabel 24. Rincian Belanja Modal Lainnya

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Software	69.000.000	136.115.000	(49,31)
Jumlah Belanja Kotor	69.000.000	136.115.000	(49,31)
Pengembalian	0	0	N/A
Jumlah Belanja	69.000.000	136.115.000	(49,31)

Terdapat belanja modal lainnya senilai Rp69.000.000,00 yaitu berupa Aplikasi Subsite Pelayanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan NUP 100

Belanja
Penambahan Nilai
Aset Tetap
Lainnya dan/ atau
Aset Lainnya
Rp289.925.000,00

B.5.4 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp289.925.000,00 dan Rp433.119.400,00. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya mengalami penurunan

sebesar Rp149.594.400,00 bila dibandingkan dengan realisasi 2022.

Tabel 25. Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/ atau Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
1	Software	289.925.000	433.119.400	(33,06)
2	Jumlah Belanja Kotor	289.925.000	433.119.400	(33,06)
3	Pengembalian	0	0	N/A
	Jumlah Belanja	289.925.000	433.119.400	(33,06)

Rincian penurunan penambahan nilai aset tetap lainnya/asset lainnya

Tabel 25. Rincian Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/ atau Aset Lainnya

No	URAIAN	Kuantitas	Nilai
1	Pengembangan Aplikasi Subsite Sistem Informasi Permohonan Kajian (SIPK) NUP 97	1	49.950.000
2	Pengembangan Aplikasi Tools DIP Kosmetik NUP 87	1	70.000.000
3	Pengembangan Aplikasi Subsite Direktorat OT dan SK NUP 95	1	120.000.000
4	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Berbasis Digital KIE Keamanan dan Manfaat OTSKKOS NUP. 99	1	49.975.000
	Jumlah Belanja	5	289.925.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp28.116.000,00

C.1 Aset Tetap

Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp28.116.000,00 dan Rp52.630.700,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan

Persediaan
Rp28.116.000,00

C.1.1 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/ atau untuk dijual, dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp28.116.000,00 dan Rp52.630.700,00. Rincian Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Tabel 26. Rincian Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 2022*

(dalam Rupiah)

Jenis	31-Dec-23	31-Dec-22
Barang Konsumsi	28.116.000	52.630.700
Jumlah	28.116.000	52.630.700

Tidak terdapat barang usang rusak per 31 Desember 2023 .

Aset Tetap
Rp4.634.102.500,00

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.634.102.500,00 dan Rp4.855.004.370,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Peralatan dan

Mesin

Rp16.017.692.725,00

C.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp16.017.692.725,00 dan Rp13.943.165.425,00. Rincian Mutasi nilai Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin
(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	13.943.165.425
Mutasi tambah:	2.124.799.300
Pembelian	1.184.512.300
Reklasifikasi masuk	43.872.000
Transfer Masuk	890.015.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	6.400.000
Mutasi kurang:	(50.272.000)
Reklasifikasi Keluar	43.872.000
Koreksi Pencatatan Penghapusan	6.400.000
Saldo per 31 Desember 2023	16.017.692.725
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(11.686.355.425)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	4.331.337.300

Mutasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp2.124.799.300,00 merupakan transaksi pembelian, transfer masuk, dan reklasifikasi masuk dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pembelian senilai Rp1.184.512.300,00 terdiri dari :

Tabel 28. Pembelian Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Uraian	Kuantitas	Nilai
Alat Penghancur Kertas	1	6.500.000
Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1.900.000
Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	1	6.550.000
Bracket Standing Peralatan	1	1.400.000
Camera Conference	1	3.900.000
Camera Digital	1	40.599.000
Dispenser	1	13.949.000
External/ Portable Hardisk	1	1.000.000
Hard Disk	2	15.443.000
Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	1	1.682.000
Lampu Blitz Kamera	1	3.680.000
Lap Top	3	521.000.000
LCD Monitor	1	2.565.000
Lemari Besi/Metal	2	21.600.000
Lemari Es	1	3.568.300
Lemari Kayu	3	154.321.000
Lighting Mechanic	1	13.990.000
Loudspeaker	1	13.800.000
Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	6.680.000
Microphone/Wireless MIC	1	5.500.000
PC Workstation	3	214.570.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	23.700.000
Refrigerator	1	2.550.000
Rice Cooker (Alat Dapur)	1	1.285.000
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	34.100.000
Sound System	1	7.950.000
Tablet PC	1	12.950.000
Tripod Camera	1	7.880.000
TV Monitor	2	21.200.000
Video Conference	1	18.700.000
Grand Total	40	1.184.512.300

- Transfer masuk dari Satker Sekretariat Utama senilai Rp890.015.000,00 berupa barang inventaris kantor dengan Surat Keterangan No. PL.03.07.25.2522.08.23.231 tanggal 29 Agustus 2023 terdiri dari:

Uraian	Kuantitas	Nilai
Meja Kerja Kayu	29	114.550.000
Kursi Besi/Metal	13	28.875.000
Meja Kerja Kayu	67	277.245.000
Kursi Besi/Metal	96	211.750.000
Laci Box	143	257.595.000
Total	348	890.015.000

- Reklasifikasi masuk karena penyesuaian kode barang berjumlah 11 buah senilai Rp43.872.000,00, dengan rincian berikut:

URAIAN REKLASIFIKASI		SAT	QTY	NILAI	SURAT KETERANGAN
BMN AWAL	BMN AKHIR				
Refrigerator	Lemari Es	Buah	1	2.550.000	B-PL.03.01.41.412.06.23.1129 tanggal 14 Juni 2023
TV Monitor	Televisi	Buah	2	21.200.000	
Alat Rumah Tangga Lainnya	Oven Listrik	Buah	1	1.900.000	
Microwave Oven	Oven Listrik	Buah	2	4.097.000	
Audio Video Selector	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	8.049.000	
Hard Disk	External/ Portable Hardisk	Buah	2	4.126.000	B-PL.03.01.43.432.07.23.1411 tanggal 3 Juli 2023
Microwave Oven	Oven Listrik	Buah	1	1.950.000	
TOTAL			11	43.872.000	

- Koreksi pencatatan nilai bertambah berupa 2 buah PC Workstation senilai Rp3.200.000,00 dan 2 buah P.C Unit senilai Rp3.200.000,00, karena adanya kesalahan pencatatan aset masuk berupa Upgrade Ram PC dicatat sebagai pembelian, dimana seharusnya dicatat sebagai pengembangan langsung. Dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN KOREKSI PENCATATAN		SAT	Kuantitas	Nilai	SURAT KETERANGAN
BMN AWAL	BMN AKHIR				
PC Workstation	PC Workstation	Buah	2	3.200.000	B-PL.03.01.41.412.06.23.1133 tanggal 14 Juni 2023
PC Workstation	PC Unit	Buah	2	3.200.000	
132111	Peralatan dan Mesin		4	6.400.000	

Mutasi kurang peralatan dan mesin sebesar Rp50.272.000,00 yaitu berupa :

- Reklasifikasi keluar karena penyesuaian kode barang berjumlah 11 buah senilai Rp43.872.000,00, dengan rincian berikut:

URAIAN REKLASIFIKASI		SAT	QTY	NILAI	SURAT KETERANGAN
BMN AWAL	BMN AKHIR				
Refrigerator	Lemari Es	Buah	1	2.550.000	B-PL.03.01.41.412.06.23.1129 tanggal 14 Juni 2023
TV Monitor	Televisi	Buah	2	21.200.000	
Alat Rumah Tangga Lainnya	Oven Listrik	Buah	1	1.900.000	
Microwave Oven	Oven Listrik	Buah	2	4.097.000	
Audio Vidoe Selector	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	8.049.000	B-PL.03.01.43.432.07.23.1411 tanggal 3 Juli 2023
Hard Disk	External/ Portable Hardisk	Buah	2	4.126.000	
Microwave Oven	Oven Listrik	Buah	1	1.950.000	
TOTAL			11	43.872.000	

- Koreksi pencatatan penghapusan berupa 4 buah PC Workstation senilai Rp6.400.000,00 karena adanya kesalahan pencatatan aset masuk berupa Upgrade Ram PC dicatat sebagai pembelian, dimana seharusnya dicatat sebagai pengembangan langsung. Dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN KOREKSI		SAT	Kuantitas	Nilai	SURAT KETERANGAN
BMN AWAL	BMN AKHIR				
PC Workstation	PC Workstation	Buah	2	3.200.000	B-PL.03.01.41.412.06.23.1133 tanggal 14 Juni 2023
PC Workstation	PC Unit	Buah	2	3.200.000	
132111	Peralatan dan Mesin		4	6.400.000	

*Aset Tetap
Lainnya
Rp302.765.200,00*

C.2.2 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp302.765.200,00 dan Rp302.765.200,00. Aset tetap tersebut monografi, buku lainnya, dan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya. Mutasi transaksi aset tetap lainnya pada 31 Desember 2023. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya periode pelaporan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 30. Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	302.765.200
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian Aset dari penggunaan	0
Saldo per 30 September 2023	302.765.200
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2023	0
Nilai Buku per 30 September 2023	302.765.200

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang pada aset tetap lainnya

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp11.686.355.425,00)*

C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp11.686.355.425,00) dan (Rp9.390.926.255,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	16.017.692.725	10.587.604.867	5.430.087.858
2	Aset Tetap Lainnya	302.765.200	-	302.765.200
Akumulasi Penyusutan		16.320.457.925	10.587.604.867	5.732.853.058

C.3 Aset Lainnya

*Aset Lainnya
Rp608.130.354,00*

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp608.130.354,00 dan Rp838.348.452,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak Berwujud
Rp2.117.140.400,00

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp2.117.140.400,00 dan Rp2.181.715.400,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.181.715.400
Mutasi tambah:	358.925.000
Pembelian	69.000.000
Pengembangan Nilai Aset	289.925.000
Mutasi kurang:	423.500.000
Transfer Keluar	423.500.000
Saldo per 31 Desember 2023	2.117.140.400
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(1.571.454.668)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	545.685.732

Terdapat Mutasi tambah aset tak berwujud senilai Rp238.225.000,00 merupakan transaksi pembelian, Pengembangan Nilai Aset, dan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembelian senilai Rp69.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Kuantitas	Nilai
1	Aplikasi Subsite Pelayanan Publik DitRegOTSKKos (NUP. 100)	1	69.000.000
Jumlah Belanja		1	69.000.000

2. Pengembangan Nilai Aset senilai Rp289.925.000,00 merupakan transaksi pengembangan aplikasi dengan rincian sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Nilai	Keterangan
1	Pengembangan Aplikasi Subsite Sistem Informasi Permohonan Kajian (SIPK) Nup. 97	49.950.000	modul SIPK, konsultasi, perubahan role
2	Pengembangan Aplikasi Tools DIP Kosmetik Nup. 87	70.000.000	Penilaian DIP, tools penilaian,
3	Pengembangan Aplikasi Subsite Direktorat Pengawasan OT dan SK Nup. 95	120.000.000	fitur chat, infografis, PPID, pelaporan stok vitamin, sistem mutu
4	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Berbasis Digital KIE Keamanan dan Manfaat OTSKKOS Nup. 99	49.975.000	Dashboar capaian sebaran jenis masyarakat, penilaian kinerja, integrasi data, hak akses, export data
Jumlah Belanja		289.925.000	

Terdapat Mutasi Kurang senilai Rp423.500.000,00 merupakan transaksi transfer keluar ke Satker Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) berupa Aplikasi Mobile E-Reporting Efek Samping OT dan SK sesuai BA Serah terima BMN No. PL.03.07.43.432.06.23.02 tanggal 22 Juni 2023. Daftar Aset Tak Berwujud pada Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik per 31 Desember 2024 yaitu:

No	Uraian	NUP	Nilai
1	Database Sistem Monitoring	55	326.400.000
2	Ap. Tindak Lanjut Pengawasan OT dan SM di Sarprod,	80	420.636.000
3	Aplikasi E-Reporting Efek Samping Kosmetik	84	167.833.000
4	Aplikasi Mobile Public Warning Kosmetik	85	98.500.000
5	Aplikasi Arsip Digital	86	87.500.000
6	APK TOOLS DIP KOSMETIK	87	227.189.400
7	Subsite Direktorat Pengawasan OT dan SK	95	349.460.000
8	Modul e-Learning Regi.Produk dan Iklan OT dan SK	96	59.990.000
9	Subsite Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Kajian (SIPK)	97	118.450.000
10	Aplikasi Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB)	98	67.615.000
11	Aplikasi Pelaporan Berbasis Digital KIE Keamanan dan Manfaat OTSKKOS	99	124.567.000
12	Subsite Pelayanan Publik DITREGOTSKKOS	100	69.000.000
Jumlah Belanja			2.117.140.400

Aset Lain-lain
Rp0,00

C.3.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0,00 dan Rp1.704.152.234,00. Berupa barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan,

dan Kosmetik dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan Kas BLU yang dibatasi penggunaannya. Adapun mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 33. Mutasi Aset Lain-lain

(dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	1.704.152.234
Mutasi tambah:	-
Penghentian dari penggunaan	-
Mutasi kurang:	1.704.152.234
Pencatatan Barang yang mau dihapuskan	1.704.152.234
Saldo per 30 September 2023	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 September 2023	-
Nilai Buku per 30 September 2023	-

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp1.509.010.046,00)*

C.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing (Rp1.509.010.046,00) dan (Rp3.047.519.182,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	2.117.140.400	(1.509.010.046)	608.130.354
Aset Lain-Lain	0	-	0
Jumlah	2.117.140.400	(1.509.010.046)	608.130.354

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

*Kewajiban
Jangka Pendek
Rp8.586.875.000,00*

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka Pendek Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.586.875.000,00 dan Rp9.254.362.500,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan sisa kewajiban pendapatan fungsional Pengawasan Obat dan Makanan

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp8.586.875.000,00*

C.4.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp8.586.875.000,00 dan Rp9.254.362.500,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan.

*Ekuitas
(Rp3.316.526.146,00)*

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp3.316.526.146,00) dan (Rp3.508.378.978,00). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp123.989.337.500,00

Jumlah Pendapat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp123.989.337.500,00 dan Rp113.641.525.000,00

Tabel 36. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	123.989.337.500	113.641.525.000	9%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	123.989.337.500	113.641.525.000	9%
Jumlah	123.989.337.500	113.641.525.000	9%

Terdapat perubahan tata cara penerimaan PNBPFungsional yang sebelumnya secara terpusat pada satker Sekretariat Utama. Pada tahun 2023 penerimaan PNBPFungsional dilakukan pada Satker pemberi layanan.

Beban Persediaan
Rp327.646.200,00

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp327.646.200,00 dan Rp97.918.300,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	327.646.200	97.918.300	234,61
Jumlah	327.646.200	97.918.300	234,61

Beban Barang dan Jasa **D.2 Beban Barang dan Jasa**

Jasa

Rp20.680.133.607,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp20.680.133.607,00 dan Rp17.437.027.401,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	1.347.388.857	1.603.536.529	(15,97)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	92.045.540	192.637.200	(52,22)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	14.338.656	28.102.155	(48,98)
Beban Honor Operasional Satker	67.830.000	75.150.000	(9,74)
Beban Barang Operasional Lainnya	33.874.600	81.778.700	(58,58)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	60.660.000	1.142.116.443	(94,69)
Beban Bahan	7.891.302.267	4.468.405.326	76,60
Beban Honor Output Kegiatan	481.360.000	519.000.000	(7,25)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	326.857.140	301.387.136	8,45
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	59.862.300	900.000	N/A
Beban Sewa	776.788.280	440.378.878	0,94
Beban Jasa Profesi	2.382.525.000	2.360.387.840	N/A
Beban Jasa Lainnya	7.145.300.967	6.120.212.705	6834,86
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	103.034.489	N/A
Jumlah	20.680.133.607	17.437.027.401	18,60

Beban

Pemeliharaan

Rp131.558.748,00

D.3 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp131.558.748,00 dan Rp33.858.449,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 39. Rincian Beban Pemeliharaan
(dalam Rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	131.558.748	33.858.449	288,56
Jumlah	131.558.748	33.858.449	288,56

Beban Perjalanan

Dinas

Rp32.218.221.028,00

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp32.218.221.028,00 dan Rp24.078.447.659,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengawasan. Rincian Beban Perjalanan Dinas periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 40. Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	9.382.872.035	6.704.635.895	39,95
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	273.660.000	334.595.000	-18,21
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.024.270.768	2.098.196.900	91,80
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17.781.471.222	14.582.779.136	21,93
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	387.929.803	358.240.728	8,29
Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	368.017.200	24.078.447.659	N/A
Total Beban Perjalanan Dinas	32.218.221.028	24.078.447.659	33,81
Jumlah	32.218.221.028	24.078.447.659	34

Terdapat kenaikan beban Perjalanan Dinas yang dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar 33.81 persen dikarenakan adanya kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dibidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp2.490.595.412.00

D.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.490.595.412.00 dan Rp2.500.269.075,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.129.540.034	2.074.255.044	2,67
Jumlah Penyusutan	2.129.540.034	2.074.255.044	2,67
Beban Amortisasi Software	361.055.376	373.017.209	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	52.996.822	N/A
Jumlah Amortisasi	361.055.376	426.014.031	(15,25)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.490.595.410	2.500.269.075	(0,39)

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp139.137.811,00)

D.6 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian Kegiatan Non Operasional
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(144.407.811)	24.203.999	(696,63)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	83.679.909	47.555.999	75,96%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	228.087.720	23.352.000	876,74%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.270.000	0	N/A
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.270.000	0	N/A
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(139.137.811)	24.203.999	(6,75)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Senilai Rp83.679.909,00 yaitu berupa:

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp45.678.910.00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari Pendapatan Pemindahtanganan BMN sesuai NTPN No. 27AF81JNFLOQT6B5 tanggal 22 Mei 2023.
2. Pendapatan penjualan lelang kendaraan operasional Rp38.000.999,00 merupakan pendapatan penjualan lelang barang inventaris kantor dengan No NTPN 594627QLUG25MTGK tanggal 11 Agustus 2023

Beban Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp228.087.720.00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban kerugian pelepasan aset senilai Rp228.087.720.00 hal ini terjadi akibat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
(Rp3.508.378.978.00)

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp3.508.378.978.00) dan Rp6.098.817.612.00

Defisit LO
Rp68.002.044.694,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp68.002.044.694,00 dan Rp69.518.208.115,00 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0.00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0.00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Nilai Koreksi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp0.00

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Koreksi Atas Reklasifikasi

mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Rp0.00

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

(Rp5.646.136,00)

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp5.646.136,00) dan (Rp45.000.000.00). Koreksi ini dilakukan karena adanya reklasifikasi masuk berupa :

1. Oven Listrik sebanyak 2 unit masing – masing senilai Rp76.818.00.
2. Koreksi pencatatan bertambah berupa 2 unit PC Workstation masing-masing senilai Rp1.200.000.00. dan;
3. Koreksi pencatatan bertambah berupa 2 unit PC. Unit masing – masing senilai Rp1.600.000.00 dan Rp1.200.000.00

Koreksi Lain-Lain
Rp0.00

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0.00 dan (Rp7.419.637.500). Koreksi ini merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

Transaksi Antar Entitas **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Entitas
(Rp67.804.545.726,00)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp67.804.545.726,00) dan (Rp71.660.767.205,00) Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 43 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	123.410.799.909
Ditagihkan ke Entitas Lain	(54.876.482.183)
Transfer Masuk	(729.772.000)
Jumlah	67.804.545.726

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

DDEL / DKEL

Rp123.410.799.909,00

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023. DDEL sebesar Rp123.410.799.909,00 sedangkan DKEL sebesar (Rp54.876.482.183,00)

Tabel 44 Rincian Nilai Transaksi Diterima Dari Entitas Lain
(dalam Rupiah)

No	Akun	Uraian	Realisasi
1	425321	Pendapatan jasa Pengawasan Obat dan Makanan	123.410.799.909

*Kenaikan/
Penurunan*

Entitas

Rp191.852.832,00

E.5 Kenaikan/Penurunan Entitas

Nilai Kenaikan Entitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp191.852.832,00 dan (Rp9.607.196.590,00)

Ekuitas Akhir

(Rp3.316.526.146,00)

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp3.316.526.146,00) dan (Rp3.508.378.978,00).

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1.1 Revisi POK terkait Anggaran Covid – 19

Pada period tahun anggaran 2023 telah dilakukan revisi POK pada bulan Agustus dengan anggaran semula senilai Rp104.400.000,00 menjadi Rp60.660.000,00 dengan realisasi sampai dengan bulan Juli senilai Rp60.660.000,00

F.1.2 Keterangan Belanja Sewa

Sampai dengan periode 31 Desember 2023 terdapat Belanja Sewa senilai Rp776.788.000,00 yaitu terdiri dari:

Tabel 45.K Rincian Belanja Sewa
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi
1	Sewa Rumah Dinas Jabatan	332.328.000	332.328.000
2	Sewa Kendaraan	262.300.000	262.300.000
3	Sewa tempat pertemuan	124.400.000	124.400.000
4	Sewa mesin fotocopy	56.331.000	56.330.280
5	Sewa tenda dan perlengkapan	1.430.000	1.430.000
Total		776.789.000	776.788.280

F.1.3 Pengungkapan Terkait Capaian Output Strategis

Selama periode Tahun Anggaran 2023, output strategis yang telah dicapai oleh satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut :

Kode Output Strategis	Uraian RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Satuan	Realisasi Vol. Keluaran
41 ABG001 29	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam Indonesia yang diselesaikan	567.060.000	567.060.000	100	123	Rekomendasi Kebijakan	100

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Tahun Anggaran 2023

41 19	BAH001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	4.015.224.00 0	3.988.924.7 60	99	8096	doku men	100
41 29	AFA001	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	5.415.378.00 0	5.420.445.1 94	100	10	Stan dar	100
63 85	BDC002	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	6.332.170.00 0	6.332.148.7 15	100	155	Oran g	100
63 85	BDC001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	6.467.460.00 0	6.466.840.9 26	100	294	Oran g	100
41 19	BIA001	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	8.402.198.00 0	8.418.069.6 36	100	2520	Kepu tusa n	100
41 28	PCA001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	11.904.081.0 00	11.989.237. 322	101	60048	Kepu tusa n	100
41 29	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	996.963.000	996.963.000	100	85	Unit	100
41 21	BIA001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	6.994.660.00 0	7.054.192.1 01	101	1568	Kepu tusa n	100
41 29	CAB001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	236.500.000	236.499.300	100	20	Unit	100

41 21	BAH001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	3.545.641.00 0	3.582.635.3 59	101	11323	doku men	100
----------	--------	---	-------------------	-------------------	-----	-------	-------------	-----

F.1.4 Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2023

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. pada Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran. Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada pada Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

- A. **PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.** Pelaksanaannya diantaranya melalui **1 (satu)** program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu mencapai **Rp11.904.081.000,00** dan realisasi sebesar **Rp11.989.237.322,00** dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker/Unit Kerja	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
4128 Direktorat Registrasi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	11.904.081.000	11.989.237.322	100,7	Keputusan	60.048	119.194	100

F.1.5 Virtual Account Bendahara Pengeluaran

Laporan Keuangan Deputy II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai 1 rekening yaitu rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Mandiri Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 8100124451611002 dan berubah menjadi Rekening Virtual Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 8100124451611000. Rincian Rekening pada Bendahara Pengeluaran Pembantu:

No	BPP	No Rekening
1	BPP Dit. Pengawasan Kosmetik	8100124451611001
2	BPP Dit. Pengawasan Standardisasi OT, SK dan Kos	8100124451611002
3	BPP Dit. Registrasi OT, SK dan Kos	8100124451611003
4	BPP Dit. PMPU OT, SK, dan Kos	8100124451611004
5	BPP Dit. Pengawasan Kosmetik	8100124451611005

F.1.6 Pengungkapan Terkait Tematik APBN

Berkaitan dengan penandaan tematik APBN diatur bahwa satu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema. Tema-tema APBN terdiri atas 8 tema, 1 diantaranya terdapat di Satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker/Unit Kerja	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%	Keterkaitan dengan PN
4119 Direktorat Pengawasan OT dan SK	BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	4.015.224.000	3.988.924.760	99,35	Dokumen	8096	8371	100	Anggaran Kesehatan (06)
4119 Direktorat Pengawasan OT dan SK	BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang	8.402.198.000	8.418.069.636	100,2	Keputusan	2520	2667	100	Anggaran Kesehatan (06)

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Tahun Anggaran 2021

	Diselesaikan Tepat Waktu								
4121 Direktorat Pengawasan Kosmetik	BAH.001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	3.545.641.000	3.582.635.359	101	Dokumen	11323	21591	1000	Anggaran Kesehatan (06)
4121 Direktorat Pengawasan Kosmetik	BIA.001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	6.994.660.000	7.054.192.101	100,9	Keputusan	1568	1802	1000	Anggaran Kesehatan (06)
4128 Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	PCA.001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	11.904.081.000	11.989.237.322	100,7	Keputusan	60048	119194	1000	Anggaran Kesehatan (06)
4129 Direktorat Standar disasi OT, SK dan Kosmetik	ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam Indonesia yang diselesaikan	567.060.000	567.060.000	100	Rekomendasi Kebijakan	123	132	1000	Anggaran Kesehatan (06)
4129 Direktorat Standar disasi OT, SK dan Kosmetik	AFA.001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	5.415.378.000	5.420.445.194	100,1	Standar	10	11	1000	Anggaran Kesehatan (06)
4129 Direktorat Standar disasi OT, SK dan Kosmetik	CAB.001 Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	236.500.000	236.499.300	100	Unit	20	23	1000	Anggaran Kesehatan (06)
Jumlah		41.080.742.000	41.257.063.672	100,4					

F.1.7 Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik no. HK.02.02.41.412.09.23.1589 tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2023. Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen. Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM. dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

No	Jabatan	Semula	Menjadi
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Dra. Asih Liza Restanti. Apt. M.Kes	Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
2	Pejabat Pembuat Komitmen I	Meyla Nurwitasari. ST	Meyla Nurwitasari. ST
3	Pejabat Pembuat Komitmen II	Dra. Joelianti Diastoetiningsih	Kristyawan Hadiyanto Dwiputra., S.E
4	Pejabat Pembuat Komitmen III	Faried Rahendra. SP	Faried Rahendra. SP
5	Pejabat Pembuat Komitmen IV	Dra. Isnaeni. Apt (M.epid)	Wijiasih. SF. Apt..M.Si
6	Pejabat Pembuat Komitmen V	Pulan Widyanati. S.Si. Apt..M.Si	Pulan Widyanati. S.Si. Apt..M.Si
7	Pejabat Penandatanganan SPM	Aprizal. S.Kom	Aprizal. S.Kom
8	Bendahara Pengeluaran	Yenny Komalasari. SE	Yenny Komalasari. SE